

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko di rumah dinas Jalan Panglima Sudirman nomor 98 Kota Batu, Sabtu (16/9/2017) siang. Setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) bersama empat orang lainnya, Eddy sempat diamankan ke Polda Jawa Timur untuk diperiksa. Empat orang yang ditangkap bersama Eddy adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu berinisial EDS, Kepala BKAD Pemkot Kota Batu berinisial ZE, seorang pengusaha FAL, dan seorang supir berinisial Y. Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif membeberkan kronologi OTT Wali Kota Batu tersebut. Pada Sabtu (16/9/2017) pukul 13.00 siang EDS bertemu dengan seorang pengusaha FAL di sebuah resto. (Suara.com, 2017)

Hj. Dewanti Rumpoko selaku Wali Kota yang baru, belajar dari kesalahan Wali Kota yang sebelumnya dan menanggapi pernyataan yang diutarakan oleh MCW (2018) bahwa pengelolaan keuangan daerah yang kurang efektif, beliau memaparkan bahwa kepemimpinan dirinya lebih memfokuskan pada bidang dasar, penguatan sistem pengendalian serta fokus dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) agar dapat tercapainya pengelolaan keuangan yang efektif serta dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih baik. (Restorasi hukum, 2019)

Untuk mencapai efektivitas pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik, karena Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan organisasi sektor public Sari *et al.* (2017), serta kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Edy (2009) yaitu kompetensi dalam organisasi publik maupun privat sangat diperlukan terutama untuk menjawab tuntutan organisasi, di mana adanya perubahan yang sangat cepat, perkembangan masalah yang sangat kompleks dan dinamis serta ketidakpastian masa depan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa keagenan dalam agency theory adalah perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Sejalan dengan hal itu Lane (2003) juga menyatakan teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen Lane (2000). Lebih jauh, Christensen (1992) menyatakan teori prinsipal-agen dapat menjadi alat analitis untuk penyusunan dan pengimplementasian anggaran publik. Negara demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah, dalam penelitian ini, hubungan keagenan dapat dilihat melalui pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai principal adalah masyarakat kota Batu selaku pembayar pajak yang akan digunakan sebagai sumber dana daerah. Sedangkan agent disini adalah pemerintah daerah kota Batu, selaku pengelola keuangan daerah.

Sari *et al.* (2017) meneliti tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil dari penelitian ini membuktikan terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan itu Tanzerina *et al.* (2017) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderating di Provinsi Riau, penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan keuangan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta sistem pengendalian internal memoderasi hubungan antara sistem keuangan daerah dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Indragiri Hulu Riau. Serta Iskandar *et al.* (2015) meneliti tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru), hasil penelitian ini membuktikan bahwa Sistem kontrol internal pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan kontrol fungsional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas area manajemen keuangan.

Balai kota Among Tani Kota Batu dipilih karena (Restorasihukum, 2019) dan MCW (2018) memberitakan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kota

Batu kurang efektif, dan wali kota Batu yang baru ingin memperbaiki sumber daya manusia untuk mewujudkan pembangunan Kota Batu menjadi lebih baik lagi.

Penelitian ini akan menguji pengaruh SPIP dan kompetensi SDM terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batu. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada objek yang diteliti, penelitian sebelumnya berada di dinas Kota Surakarta, sedangkan penelitian ini berada di Balai Kota Among Tani Kota Batu.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

2. Manfaat

- a. Praktis : Outpout yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam memperbaiki sistem pengendalian internal dan juga lebih selektif lagi dalam memilih sumberdaya manusia yang akan bekerja sebagai pengelola keuangan daerah, serta lebih efektif lagi dalam mengelola keuangan daerah.
- b. Teoritis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi bagi masyarakat maupun pihak eksternal terkait dengan keefektivitasan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Batu serta memberikan gambaran terkait kinerja yang dilaksanakan oleh PemDa Kota Batu.

